

ANALISIS KERANGKA HUKUM KEUANGAN ISLAM

ANALYSIS OF THE LEGAL FRAMEWORK OF ISLAMIC FINANCE

Nur Afiah¹ Rahmawati Muin² Amiruddin Kadir³

Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar^{1,2,3}
nurafiahfw@gmail.com, rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id,
amiruddin.kadir@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada perkembangan dan evolusi kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia seiring berjalannya waktu. Peraturan dan standar syariah yang mengatur industri Keuangan Syariah di Indonesia, dimana akan mengeksplorasi peran penting mereka dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Serta implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan serta kinerja lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yakni berpegang teguh kepada Alquran dan Hadits sehingga lebih di kenal keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif penting dalam menghadapi tantangan global dalam sistem keuangan kontemporer. Metodologi dalam penelitian ini Melibatkan kajian dan analisis berbagai dokumen, termasuk peraturan, undang-undang, dan kebijakan terkait keuangan syariah di Indonesia. Metode ini membantu dalam menelusuri sejarah dan perkembangan hukum keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini Kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan seiring waktu, didukung oleh adopsi berbagai regulasi. Pembentukan Bank Syariah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Syariah (BPKPS), serta pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah pada 2008 dan Undang-Undang Keuangan Syariah pada 2011 adalah langkah-langkah strategis yang bertujuan memfasilitasi pertumbuhan industri keuangan syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia memberikan dampak positif, terlihat dari pertumbuhan nasabah, diversifikasi produk dan layanan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : Kerangka Hukum, Keuangan Syariah ,Evolusi

Abstract

This research focuses on the development and evolution of the legal framework of Islamic Finance in Indonesia over time. It explores the crucial role of Sharia regulations and standards that govern the Islamic Finance industry in Indonesia, emphasizing their

importance in maintaining compliance with Islamic principles. Additionally, the study examines the implementation of Islamic Finance laws in Indonesia and their impact on the growth and performance of Islamic financial institutions, including Sharia banks and microfinance institutions. Islamic finance is a financial system operating based on Sharia principles, rooted in the Quran and Hadith, making it widely known as Sharia finance. The research aims to conduct a comprehensive analysis of the legal framework of Islamic Finance in Indonesia and its effects on the economic, social, and environmental aspects, presenting itself as a crucial alternative in addressing global challenges in contemporary financial systems. The methodology employed in this research involves the examination and analysis of various documents, including regulations, laws, and policies related to Islamic finance in Indonesia. This method aids in tracing the history and development of Islamic finance laws. The findings of this research reveal that the legal framework of Islamic Finance in Indonesia has undergone significant evolution supported by the adoption of various regulations. Strategic measures such as the establishment of Sharia banks, the formation of the Financial and Development Supervisory Board for Sharia (BPKPS), and the enactment of the Sharia Banking Law in 2008 and the Sharia Financial Law in 2011 aim to facilitate the growth of the Islamic finance industry and ensure compliance with Sharia principles. The implementation of Islamic Finance laws in Indonesia has positively impacted the growth of the industry, evidenced by the increase in customers, diversification of products and services, and enhanced public trust

Keywords: *legal framework, Islamic Finance, Evolution*

Pendahuluan

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah yakni berpegang teguh kepada Alquran dan Hadits sehingga lebih di kenal keuangan syariah. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT, dijalankan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sistem ini mencakup berbagai aspek aktivitas keuangan, termasuk perbankan, investasi, asuransi dan transaksi lainnya

Sistem keuangan global saat ini menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal ketidakstabilan ekonomi maupun isu-isu etika yang muncul seiring dengan perkembangan waktu. Salah satu alternatif yang semakin mendapatkan perhatian adalah Keuangan Syariah. Keuangan Syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, menawarkan solusi yang unik dalam mengatasi beberapa masalah ekonomi dan etika yang dihadapi dunia saat ini.¹

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konferensi-Pers-KSSK>

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan syariah.² Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem ini, diperlukan kerangka hukum yang kuat dan berkelanjutan. Kerangka hukum Keuangan Syariah akan mengatur berbagai aspek, termasuk regulasi, pengawasan, produk, dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³

Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memahami kerangka hukum ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana Keuangan Syariah telah berkembang, mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, dan merenungkan prospek masa depannya. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana Keuangan Syariah dapat menjadi salah satu alternatif penting

Dengan merumuskan masalah-masalah ini, makalah akan menggali lebih dalam tentang kerangka hukum Keuangan Syariah, serta implikasi dan dampaknya terhadap berbagai aspek dalam konteks Indonesia dan sejauh mana Keuangan Syariah dapat berperan dalam mengatasi tantangan global saat ini.

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah untuk Makalah "Analisis Kerangka Hukum Keuangan Syariah":

1. Bagaimana kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia telah berkembang dan berevolusi seiring waktu?
2. Apa saja peraturan dan standar syariah yang mengatur industri Keuangan Syariah di Indonesia, dan bagaimana peran mereka dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam?
3. Bagaimana implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia mempengaruhi pertumbuhan dan kinerja lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah?

Metode Penelitian

² <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>

³ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-lebih-dekat-tentang-ekonomi-syariah-di-indonesia>

Metodologi dalam penelitian ini Melibatkan kajian dan analisis berbagai dokumen, termasuk peraturan, undang-undang, dan kebijakan terkait keuangan syariah di Indonesia. Metode ini membantu dalam menelusuri sejarah dan perkembangan hukum keuangan syariah

Tinjauan Pustaka

Sejarah dan Evolusi Kerangka Hukum Keuangan Islam :

Sejarah kerangka hukum Keuangan Islam mencerminkan perjalanan evolusi sistem hukum yang mengatur kegiatan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Awalnya, pada abad ke-7 M, praktik keuangan sesuai syariah muncul dengan penyebaran Islam, mengedepankan prinsip keadilan dan larangan riba. Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, hukum ekonomi Islam semakin terorganisir berkat kontribusi ulama terkemuka. Kemudian, selama beberapa abad, praktik keuangan Islam mengalami kemunduran akibat faktor eksternal seperti penjajahan dan dinamika sosial, yang menyebabkan terabaikannya prinsip-prinsip syariah.⁴

Pada abad ke-20, upaya revitalisasi keuangan Islam muncul, dengan negara-negara seperti Pakistan, Sudan, dan Malaysia menerapkan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendirian Bank Islam Malaysia pada tahun 1963 menandai era modern lembaga keuangan Islam. Dalam era kontemporer, dengan globalisasi, lembaga-lembaga keuangan Islam semakin diakui internasional, dan organisasi seperti AAOIFI dan IFSB dibentuk untuk mengembangkan standar global. Pada tahun 2008, beberapa negara mengimplementasikan kerangka hukum khusus untuk keuangan Islam, memberikan dasar yang jelas dan mendukung pertumbuhan industri ini. Meskipun telah mengalami evolusi signifikan, keuangan Islam masih dihadapkan pada tantangan, termasuk perbedaan interpretasi hukum syariah dan kebijakan regulasi yang belum sepenuhnya harmonis. Masa depan kerangka hukum keuangan Islam melibatkan upaya untuk meningkatkan harmonisasi, transparansi, dan konsistensi dalam regulasi global, menggambarkan perjalanan panjang yang melibatkan pembaruan, revitalisasi, dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Prinsip-prinsip Hukum dalam Keuangan Islam

⁴Imaniyati, Neni Sri. "PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN." Syiar Hukum, vol. 11, no. 1, Jan. 2009, pp. 21–38, doi:10.29313/sh.v11i1.510.

Prinsip-prinsip hukum keuangan Islam didasarkan pada kerangka konsep syariah yang mencakup aspek etika, moral, dan spiritual. Ringkasan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Larangan Riba (Bunga): Transaksi dengan pembayaran atau penerimaan bunga dilarang karena dianggap merugikan dan tidak adil. Prinsip Keadilan dan Keterbukaan (Adl wal-Ihsan): Keadilan dan transparansi ditekankan dalam transaksi, dengan tujuan kesejahteraan bersama. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah): Konsep bagi hasil digalakkan dalam investasi, melibatkan kemitraan dan tanggung jawab bersama.⁵ Larangan Investasi dalam Bisnis Haram: Investasi dalam bisnis yang dianggap haram dilarang, termasuk perjudian dan minuman keras.

Kewajiban Zakat dan Sadaqah: Zakat wajib diberikan untuk membantu yang membutuhkan, sementara sadaqah dianjurkan sebagai amalan kebajikan.

Larangan Gharar dan Maisir: Transaksi dengan ketidakpastian berlebihan dan unsur perjudian tidak diperbolehkan.

Syarat Keberlanjutan (Sustainable Development): Transaksi dan investasi harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Lembaga keuangan Islam harus patuh pada prinsip-prinsip syariah dengan bantuan dewan syariah. Prinsip-prinsip ini menciptakan dasar etika dan moral dalam keuangan Islam, mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Mereka mencerminkan nilai-nilai syariah dan memberikan pedoman bagi pelaku keuangan Islam dalam menjalankan aktivitas keuangannya.

Peran Lembaga Pengawas dan Regulator:

Lembaga pengawas dan regulator memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengatur berbagai aktivitas di berbagai sektor, termasuk keuangan. Peran mereka mencakup pengawasan terhadap kepatuhan pelaku industri terhadap peraturan dan standar yang berlaku, melindungi kepentingan publik, serta menjaga stabilitas dan integritas pasar. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penjaga keamanan dan kesehatan industri, mencegah risiko keuangan, mengembangkan kebijakan yang

⁵Bombang, Saifullah. "ETIKA DAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Jurnal Hukum Unsulbar*, Apr. 2018, doi:10.31605/j-law.v1i1.48.

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menyediakan pedoman bagi pelaku industri agar beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, lembaga pengawas dan regulator memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil.⁶

Tantangan dan Peluang dalam Kerangka Hukum Keuangan Islam

Tantangan dan peluang dalam kerangka hukum keuangan Islam mencerminkan dinamika kompleks yang dihadapi oleh industri ini. Tantangan termasuk perbedaan interpretasi hukum syariah, ketidakharmonisan regulasi, dan kompleksitas dalam mengatasi isu-isu keuangan modern. Selain itu, keberlanjutan pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan utama.

Sementara itu, peluang muncul dari meningkatnya kesadaran akan keuangan berbasis syariah, potensi inklusivitas keuangan Islam, dan dorongan untuk pengembangan produk inovatif yang sesuai syariah. Dalam konteks global, peluang juga terletak pada peningkatan kerjasama internasional untuk menyatukan standar dan memperkuat fondasi hukum keuangan Islam secara global. Dengan mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang, industri keuangan Islam dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan masyarakat.

Implementasi dan Dampak Kerangka Hukum Keuangan Islam :

Implementasi kerangka hukum keuangan Islam memiliki dampak signifikan pada industri keuangan dan masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, lembaga keuangan Islam dapat beroperasi dengan kepastian, menjalankan aktivitas sesuai prinsip syariah. Ini memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan mendukung pertumbuhan industri.

Dampak positifnya termasuk pengembangan produk keuangan inovatif yang sesuai syariah, pertumbuhan investasi berkelanjutan, dan inklusivitas keuangan bagi lebih banyak lapisan masyarakat. Selain itu, implementasi kerangka hukum keuangan Islam dapat membawa keuntungan bagi perekonomian secara keseluruhan, menciptakan lingkungan keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan, dampak positifnya memperlihatkan potensi besar yang dapat

⁶ Badruzaman, Dudi. Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. no. 2, Sept. 2019, pp. 82-95, doi:10.31949/mr.v2i2.1392.

dihasilkan melalui implementasi efektif dan konsisten dari kerangka hukum keuangan Islam.

PEMBAHASAN

Perkembangan Kerangka Hukum Keuangan Syariah di Indonesia

Kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring waktu. Perkembangan ini mencakup beberapa tahap penting dalam mengatur dan memfasilitasi pertumbuhan industri keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁷

Berikut adalah beberapa poin utama yang menjelaskan bagaimana kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia telah berkembang dan berevolusi:

1. *Era Awal dan Undang-Undang Perbankan:* Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan undang-undang perbankan yang memungkinkan operasional bank syariah. Ini adalah langkah awal dalam mengakomodasi sistem keuangan syariah dalam kerangka hukum.⁸
2. *Pendirian Badan Pengawas Syariah:* Untuk mengawasi dan mengatur bank syariah serta produk-produk keuangan syariah lainnya, Badan Pengawas Syariah (BPS) didirikan pada tahun 2001. BPS bertugas mengeluarkan pedoman dan fatwa syariah serta mengawasi kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam.
3. *Pengembangan Peraturan Syariah:* Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai peraturan dan standar syariah yang mengatur produk-produk dan transaksi keuangan syariah. Ini mencakup peraturan tentang akuntansi syariah, audit syariah, dan pengelolaan dana investasi syariah.
4. *Inklusi Keuangan Syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008:* Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk industri keuangan syariah dan mempromosikan pertumbuhannya.
5. *Pengembangan Produk Keuangan Syariah:* Selain bank syariah, Indonesia

⁷ Miranda Gultom, "Sambutan Deputi gubernur Senior Bank Indonesia pada seminar 'Strategi pengembangan Lembaga Syariah di Indonesia' BI" (Jakarta, 2005), 3.

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perbankan

juga telah mengembangkan produk-produk keuangan syariah lainnya seperti sukuk syariah, reksa dana syariah, dan asuransi syariah. Perkembangan ini didukung oleh peraturan yang memfasilitasi penciptaan dan perdagangan produk-produk ini.

6. *Keterlibatan Lembaga Internasional*: Indonesia juga berperan aktif dalam mengembangkan kerangka hukum Keuangan Syariah secara internasional. Negara ini menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang mempromosikan Keuangan Syariah.
7. *Tantangan dan Regulasi yang Terus Berkembang*: Meskipun telah ada banyak perkembangan positif dalam kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia, masih ada tantangan yang harus diatasi. Ini termasuk perbaikan dan penyempurnaan regulasi serta mengatasi masalah seperti harmonisasi antara hukum perdata dan hukum syariah.⁹

Perkembangan kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, ini juga mencerminkan pertumbuhan industri keuangan syariah yang semakin berkembang pesat dan semakin banyak diadopsi oleh masyarakat Indonesia.

Peraturan Dan Standar Syariah Yang Mengatur Industri Keuangan Syariah Di Indonesia

Peraturan dan standar syariah yang mengatur industri Keuangan Syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Dengan ketatnya pengaturan ini, setiap lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup larangan riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram (terlarang) menurut ajaran Islam, seperti perjudian atau minuman keras.

Selain itu, peraturan dan standar syariah juga menetapkan kriteria yang ketat dalam penilaian aset dan kelayakan investasi agar sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Hal ini berarti bahwa semua produk dan layanan keuangan yang

⁹ M. Ma'ruf Abdullah dan Elida Mahriani, *Hukum keuangan syariah pada lembaga bank dan non bank*, Cetakan I (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).17

disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus melalui proses penelitian yang ketat dan mendalam untuk memastikan bahwa mereka mematuhi syariah.

Selanjutnya, pengaturan ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang kuat oleh otoritas terkait, seperti Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi semua peraturan dan standar yang telah ditetapkan, serta untuk menegakkan sanksi jika ditemukan pelanggaran.¹⁰

Dengan adanya peraturan dan standar syariah yang kuat, industri Keuangan Syariah di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia dapat dengan yakin menggunakan layanan keuangan syariah karena mereka tahu bahwa transaksi dan operasi lembaga keuangan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat untuk mematuhi nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Ini juga membantu dalam mempromosikan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka.

Beberapa peraturan dan standar syariah yang relevan di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008): Undang-Undang ini adalah landasan utama bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Ini mengatur pendirian, pengawasan, dan operasional bank syariah. UU ini juga memberikan dasar hukum untuk Badan Pengawas Syariah (BPS), yang bertanggung jawab mengeluarkan fatwa syariah dan memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI): MUI adalah lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa syariah yang mengikat dalam konteks Indonesia. Fatwa-fatwa ini digunakan sebagai panduan untuk operasional bank syariah dan produk-produk keuangan syariah lainnya. MUI juga memiliki peran penting dalam menginterpretasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi dan keuangan.
3. Standar Akuntansi Syariah (SAS): Standar Akuntansi Syariah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) dan digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. SAS mencakup panduan tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

¹⁰W. Widiāna, *Analisis Perkembangan Peraturan dan Penerapan Akuntansi Syariah di Indonesia* *Law and Justice* 2, no. 1 (21 Juni 2017): 35–43, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4335>.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK memiliki peran dalam mengawasi industri keuangan secara keseluruhan, termasuk industri Keuangan Syariah. Mereka mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek operasional bank syariah, termasuk persyaratan modal, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
5. Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): Undang-Undang ini mengatur penerbitan dan perdagangan surat berharga syariah negara (sukuk syariah) di Indonesia. Sukuk syariah adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan.
6. Peraturan tentang Reksa Dana Syariah: OJK juga mengeluarkan peraturan yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan investasi dalam reksa dana syariah. Reksa dana syariah adalah produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah.¹¹

Peraturan dan standar syariah ini memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan industri Keuangan Syariah di Indonesia terhadap prinsip-prinsip Islam. Mereka memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk-produk, menjalankan operasional mereka, dan mengelola risiko secara sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, peraturan ini juga memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk-produk keuangan syariah dipantau dan diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Dari hal tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa peraturan dan standar syariah memiliki peran krusial dalam menjaga kepatuhan industri Keuangan Syariah di Indonesia terhadap prinsip-prinsip Islam. Mereka berfungsi sebagai panduan yang jelas bagi lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk, menjalankan operasional, dan mengelola risiko sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, peraturan ini juga memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk keuangan syariah dipantau dan diawasi untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, menjadikan peraturan dan standar syariah sebagai landasan yang kuat untuk perkembangan dan kepercayaan dalam industri ini

¹¹Abdullah dan Mahriani, *Hukum keuangan syariah pada lembaga bank dan non bank*.

Implementasi Hukum Keuangan Syariah di Indonesia

Implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia telah membawa perubahan yang mendalam dalam lanskap keuangan negara ini. Dampaknya yang paling mencolok adalah terlihat dalam pertumbuhan yang pesat dan kinerja gemilang lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Bank-bank syariah telah muncul sebagai pesaing kuat dalam industri perbankan Indonesia, dengan jaringan cabang yang semakin luas dan pertumbuhan aset yang stabil. Mereka telah memenuhi tuntutan masyarakat akan alternatif perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah telah membuka pintu inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Mereka telah memberikan akses keuangan kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan perbankan. Ini bukan hanya pertumbuhan dalam angka, tetapi juga meningkatnya kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang telah membantu mengukuhkan posisi Keuangan Syariah sebagai pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia. Dengan perubahan ini, masyarakat semakin percaya bahwa mereka dapat berinvestasi dan menyimpan uang mereka dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, yang pada akhirnya berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.¹²

Berikut adalah beberapa dampak utama dari implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia:

1. *Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah*: Implementasi hukum Keuangan Syariah telah menjadi pemicu utama dalam mengakselerasi pertumbuhan industri ini di Indonesia. Salah satu indikator paling mencolok dari pertumbuhan ini adalah fenomena perkembangan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dalam beberapa tahun terakhir.¹³ Bank syariah, yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Mereka telah membuka cabang-cabang baru di seluruh Indonesia, merangkul berbagai segmen pasar, mulai dari individu hingga perusahaan besar. Dengan demikian, bank syariah telah menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aksesibilitas keuangan,

¹²Dudang Gojali, "IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis syariah* 1.02 (2019), dudang.gojali@gmail.com.

¹³<https://news.unair.ac.id/2021/05/19/kontribusi-bank-syariah-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/?lang=id>

dan memberikan alternatif yang menarik bagi konsumen yang ingin menjalankan urusan keuangan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peningkatan jumlah cabang bank syariah juga menggambarkan komitmen mereka untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh perbankan konvensional.¹⁴

Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah telah menjadi kekuatan utama dalam menyediakan solusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan berada di wilayah terpencil. Mereka menyediakan pinjaman mikro dan layanan keuangan lainnya kepada individu dan usaha kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal. Kehadiran mereka telah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh negeri.

Keseluruhan pertumbuhan industri Keuangan Syariah ini mencerminkan sejauh mana masyarakat Indonesia menerima dan mengadopsi nilai-nilai Keuangan Syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini juga memberikan kontribusi positif dalam memperkaya ekosistem keuangan Indonesia dengan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga memperkuat stabilitas dan keadilan dalam sistem keuangan negara ini. Dengan pertumbuhan yang berkelanjutan ini, Keuangan Syariah semakin menjadi elemen penting dalam lanskap keuangan Indonesia.

2. *Peningkatan Akses Keuangan*

Keuangan Syariah telah menjadi sarana yang penting untuk memerangi ketidaksetaraan akses ke sistem keuangan formal di Indonesia. Salah satu pencapaian luar biasa dari implementasi Keuangan Syariah adalah pembukaan pintu akses keuangan bagi lapisan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan golongan yang kurang mampu.

Lembaga-lembaga keuangan mikro syariah telah menjadi kekuatan utama dalam memperluas inklusi keuangan di daerah-daerah terpencil. Mereka telah mendirikan kantor-kantor lokal yang mudah diakses oleh masyarakat desa yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan layanan perbankan. Ini berarti bahwa petani kecil, pengusaha kecil, dan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di pedesaan kini memiliki akses lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan mikro yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha

¹⁴ Didi Badruzzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangansyariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 2.2 (2019): 18–95.

mereka. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan dan membantu mengurangi kemiskinan.¹⁵

Selain itu, lapisan masyarakat yang lebih miskin juga merasakan manfaat dari Keuangan Syariah melalui produk dan layanan seperti tabungan syariah yang lebih mudah diakses dan pembiayaan mikro yang lebih terjangkau. Ini membantu mereka untuk memulai usaha kecil, mengamankan masa depan keuangan mereka, dan merencanakan investasi jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan untuk keluarga mereka.

Keseluruhan, Keuangan Syariah bukan hanya merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga alat yang kuat untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan ekonomi. Ini menciptakan peluang yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, membantu mereka meraih kesejahteraan ekonomi, dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam perkembangan ekonomi negara ini.

3. *Peningkatan Kualitas Layanan*

Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah telah berfokus pada peningkatan kualitas layanan mereka untuk memastikan bahwa mereka mematuhi dengan ketat standar-standar syariah. Hal ini mencakup beberapa aspek penting yang telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah.

Pertama, dalam pengembangan produk-produk keuangan, bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah telah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap produk yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka telah menciptakan berbagai produk seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, tabungan syariah, dan reksa dana syariah. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat dengan memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi mematuhi aturan-aturan syariah. Misalnya, pembiayaan rumah syariah menghindari riba dengan menggantinya dengan skema bagi hasil yang adil dan transparan antara bank dan nasabah.

Kedua, lembaga-lembaga keuangan syariah memastikan pemenuhan standar kepatuhan syariah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Ini melibatkan pengawasan yang ketat dari Badan Pengawas Syariah (BPS) dan

¹⁵ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2019/10/18/134357183816219-ini-strategi-pemerintah-perluas-akses-keuangan>

pemantauan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan bahwa setiap transaksi tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Mereka juga mempekerjakan ahli-ahli syariah yang kompeten untuk memberikan nasihat dan panduan dalam menjalankan operasional mereka.

Ketiga, pendekatan berorientasi pada pendidikan telah menjadi bagian integral dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah aktif mengedukasi nasabah mereka tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat dari menggunakan layanan keuangan syariah. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Keuangan Syariah.¹⁶

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Ini tercermin dalam peningkatan jumlah nasabah dan dana yang dikelola oleh bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Selain itu, mereka juga mendapatkan reputasi sebagai lembaga yang terpercaya dalam menjalankan praktik bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan kualitas layanan yang semakin baik, pematuhan terhadap hukum syariah yang ketat, dan pendidikan yang berkelanjutan, lembaga-lembaga keuangan syariah terus membangun kepercayaan dan kontribusi positif mereka terhadap sistem keuangan Indonesia.

1. *Diversifikasi Produk dan Layanan*

Implementasi hukum Keuangan Syariah telah membawa dampak positif yang signifikan dalam mendorong diversifikasi produk dan layanan keuangan syariah di seluruh dunia. Bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi pelaku utama dalam menyediakan berbagai produk dan layanan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Salah satu produk yang semakin banyak diminati adalah pembiayaan rumah berdasarkan prinsip murabahah, dimana bank syariah membeli rumah yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang ditentukan bersama. Ini memberikan kesempatan kepada individu dan keluarga untuk memiliki rumah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, pembiayaan kendaraan syariah juga semakin populer. Dalam produk ini, bank syariah bisa memberikan pembiayaan kendaraan dengan

¹⁶Ali Syukron, "Dinamika perkembangan perbankan Syariah di Indonesia," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3.2 (2013).

skema ijarah, dimana bank membeli kendaraan yang diinginkan oleh nasabah dan menyewakannya kepada nasabah dengan harga sewa yang tetap. Ini memungkinkan individu untuk memiliki kendaraan tanpa melibatkan bunga atau unsur riba.

Tabungan syariah juga menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin menyimpan uang mereka dalam skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan ini seringkali memberikan bagi hasil kepada nasabah berdasarkan hasil investasi yang diperoleh oleh bank syariah dari pengelolaan dana yang disimpan oleh nasabah.

Selain itu, reksa dana syariah juga menjadi salah satu produk investasi yang semakin diminati. Reksa dana ini berinvestasi dalam instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham-saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Semua ini berarti bahwa konsumen sekarang memiliki lebih banyak pilihan ketika datang ke produk dan layanan keuangan syariah. Diversifikasi ini tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga membantu meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. *Peningkatan Kinerja Keuangan*

Lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang kuat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan aset, pendapatan, dan keuntungan mereka. Fenomena ini sebagian besar dapat diatribusikan pada meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalani kehidupan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim semakin sadar akan kehalalan dan kepatuhan agama dalam aspek keuangan mereka. Mereka ingin memastikan bahwa transaksi keuangan mereka bebas dari unsur-unsur riba dan tidak mengandung pelanggaran prinsip-prinsip syariah.

¹⁷ Siti Khalijah, "reksa dana Syariah," *Al_Intaj* 3.2 (t.t.).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan keuangan syariah dalam upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini termasuk pemberian insentif pajak dan regulasi yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah.

Pertumbuhan yang kuat dalam aset, pendapatan, dan keuntungan lembaga keuangan syariah juga menciptakan dampak positif dalam ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru, mendorong investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Selain itu, pertumbuhan ini juga membawa manfaat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah itu sendiri. Mereka dapat meningkatkan skala operasional mereka, berinvestasi dalam teknologi keuangan yang lebih canggih, dan meningkatkan kapasitas untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah mereka.

Secara keseluruhan, pertumbuhan yang kuat dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah cerminan dari perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, dan manfaat ekonomi yang luas. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan lebih lanjut dalam sektor keuangan syariah dan berpotensi untuk terus membantu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Indonesia yang semakin berkembang.

3. *Kepatuhan Terhadap Prinsip-prinsip Islam*

Implementasi hukum Keuangan Syariah adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah di seluruh dunia dapat beroperasi dengan patuh terhadap prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek operasional mereka. Hal ini mencakup seluruh spektrum aktivitas, mulai dari penawaran produk dan layanan hingga pengelolaan aset dan investasi. Dengan demikian, hukum Keuangan Syariah membentuk dasar yang kokoh untuk menjalankan operasi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Salah satu aspek yang paling penting dari implementasi hukum Keuangan Syariah adalah larangan terhadap riba atau bunga. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga adalah komponen utama dalam transaksi keuangan, yang sering kali mengarah pada akumulasi utang yang berkelanjutan. Dalam konteks syariah, riba dianggap sebagai haram atau tidak sah, dan oleh karena itu, lembaga-lembaga keuangan syariah harus mencari

alternatif yang sesuai, seperti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah, mudharabah, atau ijarah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, implementasi hukum Keuangan Syariah juga mengatur bahwa lembaga keuangan syariah harus menjalani audit dan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pengawasan terhadap bagaimana dana nasabah dikelola, investasi yang dilakukan, dan proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Audit independen ini bertujuan untuk memastikan bahwa uang nasabah tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Akibat dari implementasi hukum Keuangan Syariah adalah penciptaan tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan nasabah Muslim. Mereka dapat yakin bahwa uang mereka dikelola dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan syariah telah berhasil menciptakan hubungan yang kuat antara keuangan dan moralitas, yang memberikan manfaat nyata bagi nasabah Muslim yang ingin menjalani kehidupan keuangan sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

4. *Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran*

Implementasi hukum Keuangan Syariah telah membuka pintu untuk peningkatan pendidikan dan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya Keuangan Syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan dalam upaya pendidikan dan kampanye kesadaran yang ditujukan kepada masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami prinsip-prinsip Islam dalam konteks keuangan dengan lebih baik.¹⁸

Salah satu aspek penting dari pendidikan Keuangan Syariah adalah meningkatnya jumlah program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga keuangan syariah sendiri. Program-program ini memberikan pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam keuangan, termasuk larangan riba, kepatuhan terhadap prinsip modalisme risiko, dan konsep berbagi risiko dalam pembiayaan. Dengan akses yang lebih mudah ke

¹⁸ Badruzzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan syariah."

pendidikan semacam ini, masyarakat dapat memahami bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, upaya kesadaran juga telah memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat Keuangan Syariah. Berbagai media, seminar, lokakarya, dan kampanye informasi telah diadakan untuk memperkenalkan masyarakat dengan prinsip-prinsip dan produk Keuangan Syariah yang tersedia. Ini membantu menghilangkan kebingungan dan ketidakpastian yang mungkin ada sebelumnya dan memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang lebih berdasarkan pemahaman yang kuat.

Hasilnya, masyarakat menjadi lebih berpengetahuan tentang bagaimana keuangan syariah dapat memberikan manfaat, baik dari segi moralitas maupun finansial. Mereka menjadi lebih mampu membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka dan dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah dengan lebih efektif.

Dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran ini, diharapkan bahwa lebih banyak masyarakat akan terdorong untuk mengadopsi prinsip-prinsip Keuangan Syariah dalam kehidupan mereka, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan lebih lanjut dalam sektor keuangan syariah dan pencapaian tujuan keuangan mereka dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini adalah bukti bahwa implementasi hukum Keuangan Syariah bukan hanya mempengaruhi lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas pada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam dalam konteks keuangan.

Namun, meskipun terdapat dampak positif, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perluasan infrastruktur keuangan syariah di daerah terpencil, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas dan pelaku industri. Dengan terus mengatasi tantangan ini, Keuangan Syariah di Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kerangka hukum Keuangan Syariah di Indonesia telah berkembang dan berevolusi seiring waktu dengan perubahan peraturan dan undang-undang yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Pada dasarnya, Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah, produk, dan prinsip-

prinsip operasionalnya. Hal ini termasuk pendirian Bank Syariah pada tahun 1992 dan pembentukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Syariah (BPKPS) pada tahun 1999. Selanjutnya, pada tahun 2008, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan pada tahun 2011 mengadopsi Undang-Undang Keuangan Syariah yang mencakup lembaga keuangan syariah non-bank. Kerangka hukum ini terus berkembang untuk memfasilitasi pertumbuhan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam industri keuangan di Indonesia. Peraturan dan standar syariah yang mengatur industri Keuangan Syariah di Indonesia termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Keuangan Syariah. Selain itu, ada juga peraturan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Syariah (BPKPS) yang mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah. Peran mereka adalah menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek operasional, termasuk larangan riba, kepatuhan terhadap prinsip modalisme risiko, dan prinsip-prinsip berbagi risiko dalam pembiayaan. Regulasi ini mendukung penyelenggaraan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dengan percaya.

Implementasi hukum Keuangan Syariah di Indonesia telah secara positif mempengaruhi pertumbuhan dan kinerja lembaga keuangan syariah. Hal ini terlihat dalam peningkatan jumlah nasabah, diversifikasi produk dan layanan, pertumbuhan aset, dan kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, pemerintah juga telah memperkuat regulasi dan pengawasan, yang mendukung pertumbuhan industri ini.

Saran

1. Peningkatan Keseragaman Regulasi: Pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan keseragaman dalam regulasi Keuangan Syariah. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan memudahkan perusahaan yang beroperasi lintas batas.
2. Promosi Inovasi: Pemerintah dan lembaga terkait dapat mendorong inovasi dalam industri keuangan syariah dengan memberikan insentif kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Ini akan membantu meningkatkan daya saing sektor ini.
3. Pendidikan dan Kesadaran: Lebih banyak upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Keuangan Syariah dan manfaatnya. Kampanye pendidikan dan kesadaran dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk dan

layanan keuangan syariah.

4. Pengembangan Profesionalisme: Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang Keuangan Syariah juga sangat penting. Ini akan membantu memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah memiliki personil yang berkualitas tinggi dan dapat mengelola operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdullah dan Mahriani, *Hukum keuangan syariah pada lembaga bank dan non bank*.
- Ali Syukron, "Dinamika perkembangan perbankan Syariah di Indonesia," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3.2 (2013).
- Badruzaman, Dudi. Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. no. 2, Sept. 2019, pp. 82–95, doi:10.31949/mr.v2i2.1392.
- Badruzzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan syariah."
- Bombang, Saifullah. "ETIKA DAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Jurnal Hukum Unsulbar*, Apr. 2018, doi:10.31605/j-law.v1i1.48.
- Didi Badruzzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Lembaga Keuangansyariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 2.2 (2019): 18–95.
- Dudang Gojali, "IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis syariah* I.02 (2019), dudang.gojali@gmail.com.
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2019/10/18/134357183816219-ini-strategi-pemerintah-perluas-akses-keuangan>
<https://news.unair.ac.id/2021/05/19/kontribusi-bank-syariah-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/?lang=id>
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-lebih-dekat-tentang-ekonomi-syariah-di-indonesia>
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis-syariah-indonesia>
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konferensi-Pers-KSSK>
- Imaniyati, Neni Sri. "PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN." *Syar Hukum*, vol. 11, no. 1, Jan. 2009, pp. 21–38, doi:10.29313/sh.v11i1.510.
- M. Ma'ruf Abdullah dan Elida Mahriani, *Hukum keuangan syariah pada lembaga bank dan non bank*, Cetakan I (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).17
- Miranda Gultom, "Sambutan Deputy gubernur Senior Bank Indonesia pada seminar 'Strategi pengembangan Lembaga Syariah di Indonesia' BI" (Jakarta, 2005), 3.

Siti Khalijah, “reksa dana Syariah,” *Al_Intaj* 3.2 (t.t.).

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perbankan

W. Widiana, *Analisis Perkembangan Peraturan dan Penerapan Akuntansi Syariah di Indonesia* *Law and Justice* 2, no. 1 (21 Juni 2017): 35–43, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4335>.